



**SISTEM PEMERINTAHAN KESULTANAN TIDORE
PERSPEKTIF *AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH*
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN**

***TIDORE SULTANAL GOVERNMENT SYSTEM
AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH PERSPECTIVE IN TIDORE ISLAND CITY***

Ihwan Wahid Minu

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

Rahmat

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: rahmat09@stiba.ac.id

Muhammad Rafli HI Taher

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: muhammadraflihitaher@stiba.ac.id

Keywords :

government, sultan, Tidore, al-siyāsah al-syar'iiyah

ABSTRACT

This study aims to find out how the system of sultanate government applies in the Tidore Kingdom from a siyāsah syar'iiyah perspective. This research is a field research, where the researcher conducts research directly on the location to obtain and collect data, then it is processed using qualitative methods. The results showed that the system of government that prevailed in the Tidore Sultanate from the perspective of al-Siyāsah al-Syar'iiyah was not fully using the Islamic government system, due to a lack of understanding of al-Siyāsah al-Syar'iiyah and various customs that were ingrained in society. The city of Tidore. So with this research, it is the beginning of the efforts of preachers and preachers to always try to convey their da'wah about the Islamic government system, so that they can understand the Islamic system well. Hopefully with this research, it can provide an overview to all the figures in the Tidore Sultanate and the Tidore community in general, so that they always follow what Islam has explained about the Islamic government system.

Kata kunci :

pemerintahan, sultan, Tidore, al-siyāsah al-syar'iiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore perspektif *siyāsah syar'iiyah*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, kemudian diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku dalam Kesultanan Tidore perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iiyah* adalah tidak sepenuhnya memakai sistem pemerintahan Islam, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap *al-Siyāsah al-Syar'iiyah* dan berbagai adat istiadat yang sudah mandarah daging dalam masyarakat kota Tidore. Maka dengan adanya penelitian ini, menjadi awal upaya para dai dan mubalig untuk senantiasa berupaya menyampaikan dakwah-dakwahnya mengenai sistem pemerintahan Islam, sehingga mereka dapat memahami tentang sistem Islam dengan baik. Semoga dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan gambaran



kepada segenap tokoh-tokoh yang ada di Kesultanan Tidore dan masyarakat Tidore umumnya, agar senantiasa mengikuti apa yang telah dijelaskan Islam mengenai sistem pemerintahan Islam.

Diterima: 29 Maret 2022; **Direvisi:** 7 April 2022; **Disetujui:** 7 April 2022; **Tersedia online:** 8 April 2022

How to cite: Ihwan Wahid Minu, Rahmat, Muhammad Rafli HI Taher, "Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore Perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah di Kota Tidore Kepulauan", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (2022): 81-99. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.524.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang universal mampu menjawab segala macam problematika yang terjadi. agama Islam tidak hanya mengajarkan manusia tentang hubungannya dengan sang pencipta dan mengajarkan kepada manusia tentang hubungannya dengan manusia, akan tetapi agama Islam juga mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan pemerintah atau hubungan antara pemimpin dengan rakyat.

Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik, baik dari golongan yang berpegang teguh pada agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan apakah Rasulullah Muhammad saw mempunyai kaitan dengan masalah politik atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan, pemerintahan, dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam?

Munculnya permasalahan tersebut dipandang wajar, karena risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Artinya Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, karena inti Islam mengandung ajaran yang integratif antar tauhid, ibadah, akhlak dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.

Salah satu keteladanan yang tinggi diberikan Islam adalah permasalahan dalam bidang politik dan pemerintahan, maka dari itu Islam telah membahas banyak permasalahan yang ada di dunia politik dan pemerintahan. Banyak orang ingin meraih jabatan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan atau suatu kerajaan namun dia tidak memahami bagaimana cara memimpin dengan baik, padahal setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw

أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ¹

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin".

¹Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet: V; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007 M), h. 1293.



Dalam studi-studi Islam, politik disebut dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* ini mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya sikap politik sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah.

Al-Siyāsah al-Syar'iyah Siyāsah syariyah biasa pula dikenal dengan istilah fikih *siyāsah* dimana menurut Imam al-Bujairimi bermakna memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan".² Pengertian ini memperlihatkan bahwa *al-Siyāsah al-Syar'iyah* sangat erat hubungannya dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia dalam konteks pemerintahan.

Pada pemerintahan negara Islam, seringkali didapati pemegang kekuasaan tertinggi digelari dengan gelar Sultan. Secara etimologis term "Sultan" berasal dari kata (bahasa Arab) yakni *السلطان* jamak dari *سلاطين* yang berarti kekuasaan.³

Dalam kisah sejarah Indonesia, era kerajaan mengambil peranan yang sangat penting. Masa kerajaan merupakan pondasi atau cikal bakal pemerintahan diberlakukan dalam sebuah sistem yang teratur.

Jika dilihat dari sejarah yang terjadi di Indonesia bahwa yang pertama kali membawa tentang sistem kerajaan adalah Hindu dan Budha, namun besarnya pengaruh dan perkembangan kekuasaan politik dan ajaran Islam di Timur Tengah maka lahirlah kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia dan sekitarnya, yaitu Leran, Samudera Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Jayakarta, Sumedang, Pontianak, Sambas, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Ambon, Jailolo, Bacan, Malaka, Dan Brunei. Maka kekuasaan politik Islam tersebut menggantikan kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Budha sebelumnya.⁴

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia. Istilah Maluku dianggap berasal dari bahasa arab yang disebut dengan jazirah *Muluk* yang bermakna Pulau Raja-Raja. Anggapan ini berdasarkan pada beberapa literatur sejarah diantaranya adalah sejarah Dinasti Tang. Dinasti Tang, yang menyebutnya sebagai "Mi-li-ki," tidak dapat memastikan lokasi sesungguhnya kawasan yang ditunjuk dengan nama tersebut. Pada masa kemudian barulah diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan "Mi-li-ki" itu adalah gugusan pulau-pulau Ternate, Tidore, Makian, Bacan dan Moti.⁵

Salah satu kerajaan di Maluku Utara yang memakai sistem pemerintahan Islam yaitu Kerajaan Tidore, Kerajaan Tidore atau Kesultanan Tidore adalah kerajaan yang terletak di Kota Tidore Provinsi Maluku Utara, menurut catatan Kerajaan Tidore berdiri sejak Jou Kolano syahjati naik tahta pada 12 Rabiul awwal 502 H (1108 M).⁶

²Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, h. 295.

³*Munjid Fil Lughoh Wa Al A'lam*, (Dar El Machreq Sarl Publishers, P.O.B. Beirut-Lebanon, 1986), h. 344.

⁴Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* (Cet. III; Bandung: Surya Dinasti, 1438 H/2016 M), h. 91.

⁵Paramitha Abdurachman "Moluccan Responses to the First Intrusions of the West," *Dynamic of History*, (eds) Haryati Subadio, et. a l. (Amsterdam: North Holland Pub. Co. 1987) h. 163.

⁶Soedjpto Abimanyu, *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara* (Cet: I; Jogjakarta: Laksana, 2014 M), h. 169.



Kerajaan ini mengalami kejayaan pada abad ke-16 sampai abad ke-18 dengan menguasai beberapa pulau yang ada di sekitarnya bahkan sampai ke pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Islam dijadikan agama resmi di Kerajaan Tidore pada akhir abad ke-14. ini di buktikan dengan pergantiannya sistem kerajaan Kolano menjadi kesultanan pada masa Sultan Ciriliyati atau Sultan Djamaluddin (1495-1512 M).⁷

Ketika masa pemerintahan Sultan Nuku kesultanan Tidore mencapai pada kejayaannya, pada saat itu sitem pemerintahan ditata dengan baik. Saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir, yang dalam bahasa Tidore disebut dengan *Bobato*, Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada *Jojau* (perdana menteri).

Terdapat banyak sistem pemerintahan kesultanan Tidore lainnya, di antaranya adalah bahwa Kesultanan Tidore tidak mengenal dengan Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan yang lainnya di nusantara. Pemilihan Sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon yang diajukan oleh *Dano-Dano Folaraha* (wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Rum*, *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, *Dan Fola Bagus* dan dari nama-nama inilah maka dipilih salah satunya untuk menjadi Sultan Tidore.⁸

Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan banyaknya pemerintahan yang bersistem dengan sistem kerajaan atau kesultanan, khususnya kesultanan Tidore, apakah memakai sistem pemerintahan Islam atau tidak? Berangkat dari itu maka penelitian ini membahas mengenai sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif *al-siyāsah al-syar'iyah*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penggunaan sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, historis, filosofis, dan teoretik.

Penelusuran terhadap literatur-literatur terdahulu diperlukan untuk memudahkan dalam mencapai hasil yang maksimal. Setelah menelusuri kajian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini, maka ditemukan beberapa karya sebagai berikut:

1. Karya ilmiah jurnal yang ditulis oleh Rusdiyanto dengan judul "Kesultanan Ternate dan Tidore". Tulisan tersebut menjelaskan bahwa Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan kesultanan besar Islam di Maluku yang setara dengan kesultanan besar lain di Nusantara yang memiliki peran besar dalam proses Islamisasi di Maluku. Keberhasilan Islamisasi di Maluku banyak dipengaruhi karena ditempuh melalui pendekatan budaya sebagaimana Islamisasi di Jawa. Proses Islamisasi itu dimulai dari kalangan elit kerajaan/kesultanan yang selanjutnya diikuti oleh rakyat. Berbeda dengan tulisan ini yang mengkaji sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.

2. Karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Indo Esse berjudul Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tasoro Abad XV-XVII Perspektif Siyāsah Syar'iyah. Karya tersebut menjelaskan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Wajo

⁷Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara* (Cet. I; Yogyakarta: Brilliant books, 2017 M), h. 131-132.

⁸M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. <http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-Pemerintahan-Kesultanan-Tidore.html> (02 januari 2008).



perspektif *al-Siyāṣah al-Syar`iyyah*. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif *al-Siyāṣah al-Syar`iyyah*.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Tidore

Kesultanan Tidore terletak di Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore memiliki penduduk yang hampir 100% memeluk agama Islam.

Secara geografis letak Kota Tidore kepulauan berada hampir di tengah-tengah wilayah Provinsi Maluku Utara sehingga memiliki aksesibilitas yang hampir merata keseluruh kawasan Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore kepulauan terdapat pusat pemerintahan provinsi, yang berpusat di Kelurahan Sofifi, sebagian besar sarana dan prasarana perkantoran pemerintah provinsi diarahkan pembangunannya di daerah tersebut. Kota Tidore juga sangat berdekatan dengan Kota Ternate yang dapat mempermudah aksesibilitas dari Tidore ke Ternate yang terdapat sejumlah sentra jasa dan perdagangan serta pelabuhan dan bandar udara memadai untuk pelayanan dalam skala nasional.

Kota Tidore Kepulauan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat; sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate; di sebelah timur dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Laut Maluku.⁹

Batas wilayah Kota Tidore kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah Kota Tidore Kepulauan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat; sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate; di sebelah timur dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Laut Maluku.

Dinasti Tang, yang menyebutnya sebagai "Mi-li-ki," awalnya tidak dapat memastikan lokasi sesungguhnya kawasan yang ditunjuk dengan nama tersebut. Pada masa kemudian barulah diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan "Mi-li-ki" itu adalah gugusan pulau-pulau Ternate, Tidore, Makian, Bacan dan Moti

Letak geografis Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat; sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate; di sebelah timur dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Laut Maluku.¹⁰

Kota Tidore merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari Pulau Tidore dan beberapa pulau kecil serta sebagian daratan pulau Halmahera bagian barat. Pulau Tidore

⁹Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, *Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka*, (Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021), h. 2.

¹⁰Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018, t.h.



tergolong besar dengan memiliki luas wilayah 1.550,37 km², di samping sebagian di daratan Pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Maitara, Pulau Mare, Pulau Failonga, Pulau Woda, dan Pulau Radja. Kondisi lain Kota Tidore kepulauan terkait dengan daerah administratif adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Tidore Selatan, dengan jumlah 8 desa/ kelurahan.
2. Kecamatan Tidore Utara, dengan jumlah 14 desa/ kelurahan.
3. Kecamatan Tidore, dengan jumlah 13 desa/ kelurahan.
4. Kecamatan Tidore Timur, dengan jumlah 7 desa/ kelurahan.
5. Kecamatan Oba, dengan jumlah 14 desa/ kelurahan.
6. Kecamatan Oba Selatan, dengan jumlah 7 desa/ kelurahan.
7. Kecamatan Oba Utara, dengan jumlah 13 desa/ kelurahan.
8. Kecamatan Oba Tengah, dengan jumlah 14 desa/ kelurahan.¹¹

5. Gambaran Umum dan Sejarah Berdirinya Kesultanan Tidore

Provinsi Maluku Utara pada awalnya disebut dengan Maluku. Konon banyak orang yang mengatakan kata Maluku berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Malik* (raja) dan bentuk jamaknya adalah *Mulūk* (raja-raja), itu terbukti dengan adanya beberapa kerajaan besar yang ada di Maluku Utara. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut ada satu kerajaan yang sangat berpengaruh yaitu Kerajaan Tidore.

Kesultanan Tidore atau Kerajaan Tidore merupakan kerajaan Islam yang berpusat pada Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan sekitar abad ke 16 berlangsung hingga abad ke 18 dengan menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat.¹²

Kerajaan Tidore merupakan salah satu dari keempat kerajaan besar yang ada di Maluku Utara yaitu Kerajaan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo atau yang disebut dengan *Moloku Kie Raha* (persatuan empat kolano/kerajaan)¹³. Akan tetapi dari keempat kerajaan tersebut Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate-lah yang banyak mendapatkan perhatian dalam liputan sejarah Islam di Maluku Utara.

Kerajaan Tidore berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada 12 Rabi'ul awal 502 H (1108). Pada mulanya Kesultanan Tidore masih memakai sistem pemerintahan Kolano yang dipimpin oleh Kolano dengan berpemahaman Animisme.¹⁴

Sejak awal berdirinya hingga raja yang keempat, pusat kerajaan Tidore belum dipastikan, barulah pada era Jou Kolano Bunga Mabunga Balibunga, informasi mengenai pusat Kerajaan Tidore sedikit terkuak, tempat tersebut adalah Balibunga atau sekarang disebut kampung Rum Balibunga.

Agama Islam menjadi agama yang resmi di Kerajaan Tidore pada akhir abad ke 14 dengan sistem pemerintahan kesultanan. kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Raja Tidore ke-11 yaitu Sultan Djamaluddin.¹⁵

¹¹Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, *Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka*, (Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021), h. 12.

¹²Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 130.

¹³M. Saleh Putuhena, *Interaksi Islam dan Budaya Maluku* (Bandung: Mizan, 2006 M) h. 335.

¹⁴Soedjipto Abimanyu, *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara*, h. 169.

¹⁵Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 131.



Namun Kerajaan atau Kesultanan Tidore menuai masa kejayaannya pada masa Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad al-Mab'us Kaicil Paparangan Jou Barakati alias Sultan Nuku (1797-1805 M). Sultan Nuku dapat menyatukan Tidore dan Ternate untuk mengusir para penjajah, begitu juga dimasa inilah dibentuk pemerintahan kekuasaan yang teratur.¹⁶

Selama masa pemerintahannya Sultan Nuku berusaha mewujudkan empat cita-cita politiknya yaitu:

1. Mempersatukan seluruh kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh.
2. Mengembalikan kembali empat pilar kekuasaan kesultanan Maluku atau yang disebut dengan *Moloku Kie Raha* (persatuan empat kolano/kerjaan).
3. Mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kesultanan Maluku.
4. Mengenyahkan kekuasaan dan penjajah asing dari Maluku.¹⁷

Walaupun keempat cita-cita tersebut tidak sepenuhnya berhasil diwujudkan oleh Sultan Nuku.

Adapun daftar para Raja sampai para Sultan di Kerajaan Tidore dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁸

Tabel 1. Daftar para raja sampai para sultan di Kerajaan Tidore

No.	Nama Raja/Sultan	Masa Pemerintahan
01	Kolano Syahjati alias Muhammad Naqil bin Jaffar Assiddiq	-
02	Kolano Bosamawange	-
03	Kolano Syuhud alias Subu	-
04	Kolano Balibunga	-
05	Kolano Duko Adoya	-
06	Kolano Kie Matiti	-
07	Kolano Seli	-
08	Kolano Matagena	-
09	Kolano Nuruddin	1334-1372 M
10	Kolano Hasan Syah	1372-1405 M
11	Sultan Ciriliyati alias Djamaluddin	1495-1512 M
12	Sultan Al Mansur	1512-1526 M
13	Sultan Amiruddin Iskan Zulkarnain	1526-1535 M
14	Sultan Kiyai Mansur	1535-1569 M
15	Sultan Iskandar Sani	1569-1586 M
16	Sultan Gapi Baguna	1586-1600 M
17	Sultan Mole Majimo alian Zainuddin	1600-1626 M

¹⁶Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 132.

¹⁷Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara*, (Cet: I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010 M), h. 115.

¹⁸Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 132.



18	Sultan Ngora Malamo alias Alauddin Syah	1626-1631 M
19	Sultan Gorontalo alias saiduddin	1631-1642 M
20	Sultan Saidi	1642-1653 M
21	Sultan Mole Maginyau alias Malikiddin	1653-1657 M
22	Sultan Saifuddin alias Jou Kota	1657-1674 M
23	Sultan Hamzah Fahrudin	1674-1705 M
24	Sultan Abdul Fadhil Mansur	1705-1708 M
25	Sultan Hasanuddin Kaicil Garcia	1708-1728 M
26	Sultan Amir Bifodlil Aziz Muhiddin Malikul Manan	1728-1757 M
27	Sultan Muhammad Mashud Jamaluddin	1757-1779 M
28	Sultan Patra Alam	1780-1783 M
29	Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar	1784-1797 M
30	Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad al- Mabus Kaicil Paparangan Jou Barakati Nuku	1797-1805 M
31	Sultan Zainal Abidin	1805-1810 M
32	Sultan Motahuddin Muhammad Taher	1810-1821 M
33	Sultan Achmadul Mansur Sirajuddin Syah	1821-1856 M
34	Sultan Achmad Syaifuddin Alting	1856-1892 M
35	Sultan Achmad fatahuddin Alting	1892-1894 M
36	Sultan Achmad Kawiyuddin Alting alias Syah Juan	1894-1906 M
37	Sultan Zainal Abidin Syah	1947-1967 M
38	Sultan Djafar Syah	1999-2012 M
39	Sultan Husain Syah	2012-sekarang

B. Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore

1. Infrastruktur Pemerintahan Kesultanan Tidore

Dalam sebuah pemerintahan tidak lari dari suatu infrastruktur yang mumpuni untuk mengembangkan pemerintahan tersebut. maka suatu pemerintahan itu bisa terkenal karena dilihat dari fasilitas-fasilitas yang lengkap.

Kesultanan Tidore adalah suatu pemerintahan yang memiliki fasilitas pemerintahan yang cukup lengkap, diantaranya adalah:



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

BUSTANUL FUQAHA

Jurnal Bidang Hukum Islam

a. Kadaton atau Istana Kesultanan Tidore



Gambar 1. Kadaton atau istana kesultanan Tidore. (Sumber: Kedaton Sultan Tidore - Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya (kemdikbud.go.id), 2019)

b. Mahkota Sultan Tidore



Gambar 2. Mahkota Sultan Tidore (Sumber: Tidore, kesultanan / P. Tidore – prov. Maluku Utara | Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia (wordpress.com), 2019)



c. Panji-panji kesultanan Tidore



Gambar 3. Warna kuning adalah bendera kesultanan, Warna biru adalah bendera panglima angkatan laut, Warna putih adalah bendera khadi bidang keagamaan, Warna hitam adalah bendera BIN (Badan inteligen negara), Warna merah adalah bendera panglima angkatan darat. (Sumber: Dokumen pribadi, 2019)

d. Pakaian sultan Tidore



Gambar 4. Pakaian Sultan Tidore (Sumber: Dokumen Pribadi, 2019)

e. Masjid Kesultanan Tidore



Gambar 5. Sigi Kolano Tidore atau Masjid Kesultanan Tidore (Sumber: mesjid kesultanan tidore (ratnadewi.me), 2019)

2. Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore

Sistem pemerintahan dalam suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus memiliki landasan yang kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun. Salah satu kerajaan yang ada di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat terstruktur yaitu Kesultanan Tidore.

Kesultanan Tidore pada mulanya memiliki sistem pemerintahan tersendiri, oleh karena itu Kesultanan Tidore memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ini menjadi suatu yang menarik bagi presiden pertama Republik Indonesia untuk datang ke Tidore membahas suatu perjanjian.

Pada tahun 1947 presiden Soekarno datang ke Kesultanan Tidore untuk melakukan pendekatan terhadap sultan Tidore pada saat itu, yaitu Sultan Zainal Abidin Syah, kemudian mereka membahas suatu perjanjian, perjanjian tersebut adalah Presiden Soekarno memberikan 3 opsi bagi kesultanan Tidore, yaitu;

1. Kesultanan Tidore harus menjadi negara sendiri.
2. Kesultanan Tidore berdiri di atas penjajah Belanda.
3. Kesultanan Tidore mau bergabung dengan Negara Indonesia.

Sultan Zainal Abidin Syah memilih opsi yang ketiga yaitu memilih untuk bergabung dengan Negara Indonesia, maka presiden Soekarno pun menjadikan suatu provinsi baru yaitu Provinsi Irian Barat yang berpusat di Tidore dan mengangkat sultan sebagai gubernur pada saat itu.¹⁹ Walaupun kekuasaan yang dimiliki oleh Kesultanan Tidore sudah diberikan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia, akan tetapi masih terdapat beberapa sistem yang masih berlaku.²⁰

¹⁹Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

²⁰Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.



Mengenai dengan struktur pemerintahan Kerajaan Tidore sejak sultan pertama yaitu Sultan Syah Jati alias Muhammad Naqil yang kemudian mengalami perubahan-perubahan. dapat di uraikan sebagai berikut:

Kolano sei Bobato Pehak Raha artinya Sultan dan empat kementeriannya dengan pegawai, yang terdiri dari:

a. *Pehak Bobato* (Urusan pemerintahan yang dikepalai oleh *Jojaw*), Anggotanya:

1. Hukum-Hukum (para menteri-menteri).
2. *Sangaji-Sangaji* (Gelar para penguasa suatu wilayah atau gubernur).
3. *Gimalaha-Gimalaha* (Gelar kepala kampung).
4. *Fomanyira-Fomanyira*. (Gelar kepala dusun).

b. *Pehak Kompania* (Urusan pertahanan dikepalai oleh kapita-kapita atau mayor),

Anggotanya:

1. *Jou* mayor.
2. *Alfarisi-Alfarisi*.
3. *Jodati-Jodati* (perwira-perwira pertahanan keamanan).
4. *Serjanti-Serjanti*.
5. Kapita *Kie* (panglima pertahanan keamanan).
6. Letnam-Letnam
7. Kapita *Ngofa*.

c. *Pehak Jurutulis* (Urusan tata usaha, dikepalai oleh *Tullamo* (Sekretaris kerajaan)

Anggotanya:

1. Jurutulis *Loaloa*.
2. Beberapa menteri dalam kerajaan, yaitu :
 - a) *Sahada* (Kepala rumah tangga kerajaan).
 - b) *Sowohi Kiye* (Protokoler kerajaan bidang kerohanian).
 - c) *Sowohi Cina* (Protokoler khusus orang cina).
 - d) *Sahabandar* (Urusan administrasi pelayaran).
 - e) *Fomanyire ngare* (Public Relation kerajaan).
- d. *Pehak Lebee* (Urusan agama/syari'ah yang dikepelai oleh seorang *Qhadi*),

Anggotanya:

1. Imam-Imam.
2. Khatib-Khatib.
3. Modin-Modin.²¹

Selain struktur tersebut masih terdapat jabatan lain yang membantu menjalankan tugas kesultanan, seperti *Ganone* yang membidangi intelijen dan *Surang Oli* yang membidangi urusan propaganda.

Sistem pemerintahan Kesultanan Tidore dipimpin oleh Kolano atau Sultan. pada saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir (kementerian) yang dalam bahasa Tidore disebut Dengan *jojaw*. Anggota dewan wazir terdiri dari *Bobato Pehak Raha* (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasaan. *Bobato* ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dewan wazir.

Kesultanan Tidore sendiri memiliki ideologi tersendiri yaitu:

²¹M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. <http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-pemerintahan-kesultanan-tidore.html> (02 januari 2008).



1. *Syaraa se kitabullah*, adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.

2. *Syaraa Adat Se Nakudi*, *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah sebuah syariat atau aturan yang membimbing manusia pada keteraturan dan ini hampir sama maknanya dengan ideologi pancasila. Di antara isi dari *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah:

1. *Jou suba se tabea* (Bagaimana saling menghargai dan saling menghormati).
2. *Budi se bahasa* (Bagaimana bertutur kata dengan baik).
3. *Ngaku se rasai* (Amanah, menegakkan sebuah kepercayaan dan tidak menghinatinya).
4. *Mae se kolopino* (Rasa malu dan takut kepada Tuhan).
5. *Ching se kangeri* (Selalu rendah hati terhadap sesama manusia).²²

Namun sangat disayangkan, ideologi tersebut tidak tertulis dalam buku-buku karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Dalam sistem pergantian Kesultanan Tidore tidak mengenal Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Proses seleksi seseorang untuk menjadi sultan dilakukan ketika seorang sultan meninggal dunia, lalu calon sultan dipilih melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari pihak *Dano-Dano Folaraha* (Wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, *Fola Rum*, dan *Fola Bagus*. Dari nama-nama tersebut kemudian dibawa ke dewan pemilihan sultan yaitu *kornono gamtufkange* dan *kornono gurabunga*, kemudian dipilihlah satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore.²³

Seseorang yang hendak menjadi Sultan Tidore hendak memiliki beberapa kriteria diantaranya:

1. Mempunyai niat yang baik.
2. memiliki fisik yang kuat.
2. Harus dari keturunan sultan.
3. Mempunyai bakat yang mumpuni dalam bidang agama, pemerintahan, dan lain-lain.²⁴

Dalam Kesultanan Tidore terdapat dua kementerian atau yang dalam bahasa Tidore yaitu *Bobato*, yaitu *Bobato pehak dunia* (kementerian yang mengurus urusan keduniaan) dan *bobato pehak akhirat* (kementerian yang mengurus urusan agama).²⁵ Kementerian yang mengurus urusan keduniaan dipimpin oleh seorang *Jojau* dan Kementerian yang mengurus agama dipimpin oleh seorang Qadhi, namun samapi saat ini yang ada hanya *Jojau* karena Pihak kesultanan Tidore belum menemukan orang yang layak untuk dijadikan seorang Qadhi dikarenakan harus memiliki syarat yaitu memiliki 30 juz hafalan Al-Qur'an dan 500 hafalan hadis Rasulullah saw serta memahami hukum Fikih yang baik.²⁶

²²Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, *Wawancara*, 27 April 2019.

²³M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. <http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-pemerintahan-kesultanan-tidore.html> (02 januari 2008).

²⁴Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

²⁵Salim Sangaji (52 Tahun), Gimalaha Sultan, *Wawancara*, Tidore, 6 Juni 2019.

²⁶Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, *Wawancara*, 27 April 2019.



Kementerian Kesultanan Tidore tidak bisa memutuskan perkara sendiri, akan tetapi kementerian hanya bisa mengusulkan perkara tersebut ke Sultan Tidore kemudian dilakukanlah musyawarah untuk menetapkan perkara tersebut.²⁷

C. Analisis Perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah Terhadap Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore

Kesultanan Tidore pada mulanya merupakan kerajaan Islam yang sangat besar di wilayah Maluku Utara. Islam dijadikan sebagai suatu sistem yang berlaku pada saat itu. Setelah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Kesultanan Tidore maka diketahui letak yang sesuai dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* dan yang tidak sesuai. Berikut rinciannya:

1. Struktur pemerintahan Kesultanan Tidore

Sistem pemerintahan Kesultanan Tidore dipimpin oleh *Kolano* atau Sultan. pada saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir (kementerian) yang dalam bahasa Tidore disebut Dengan *jojau*. Anggota dewan wazir terdiri dari *Bobato Pehak Raha* (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasaan. *Bobato* ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dewan wazir.²⁸

al-Siyāsah al-Syar'iyah membahas berbagai Struktur dalam sebuah negara Islam di antaranya:

1. Dasar negara

Dasar dari negara di dalam ajaran Islam sudah tentu Islam. Di antara para tokoh Islam ada yang telah menjabarkan mengenai dengan falsafah kenegaraan Islam, salah satunya adalah Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, Di dalam bukunya “Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam” menjabarkan dua buah ayat surah al-Nisa yaitu ayat 58 dan 59 menjadi “panca dasar pemerintahan Islam”, yaitu:

1. Menunaikan amanah.
2. Menegakkan keadilan.
3. Mentaati Allah dan RasulNya.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan jalan mengadakan permusyawaratan atau peran rakyat dan mengangkat kepala negara menurut kehendak Rakyat.
5. Menjalankan hukum-hukum dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.²⁹

Dalam kesultanan Tidore terdapat pula asas-asas pemerintahannya yaitu:

1. *Syaraa se kitabullah*, adalah berpegang pada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw

2. *Syaraa Adat Se Nakudi*, *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah sebuah syariat atau aturan yang membimbing manusia pada keteraturan dan ini hampir sama maknanya dengan ideologi pancasila. Di antara isi dari *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah:

- a. *Jou suba se tabea* (Bagaimana saling menghargai dan saling menghormati).
- b. *Budi se bahasa* (Bagaimana bertutur kata dengan baik).

²⁷Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, *Wawancara*, 27 April 2019.

²⁸Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

²⁹T.M Hasbi ash-Siddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Cet. I; Jakarta: Matahari Masa, 1969 M), h. 25.



c. *Ngaku se rasai* (Amanah, menegakkan sebuah kepercayaan dan tidak menghinatinya).

d. *Mae se kolopino* (Rasa malu dan takut kepada Tuhan).

e. *Ching se kangeri* (Selalu rendah hati terhadap sesama manusia).³⁰

2. Bentuk pemerintahan

Banyak orang mengira bahwa bentuk pemerintahan di dalam Islam adalah Republik bukan kerajaan. Sesungguhnya memang ada kesamaan antara Republik dan bentuk pemerintahan di dalam sejarah Islam, yaitu dalam hal dipilihnya kepala negara, akan tetapi, Islam tidak menentukan jangka waktu tertentu yang disebut masa jabatan untuk seorang kepala negara.³¹ Ini berarti bahwa seorang kepala negara tidak dapat diganti, akan tetapi dasar pergantian seorang kepala negara bukan dengan habisnya masa jabatan.

Seorang kepala negara tetap di dalam jabatannya selama maslahat, selama dipandang baik dan mampu menjalankan tugas-tugasnya. Rakyat berhak untuk mengangkat kepala negara. Oleh karena itu, rakyat juga berhak untuk memberhentikannya apabila ada alasan-alasan untuk itu.³²

Kesultanan Tidore adalah pemerintahan berbentuk kerajaan. maka dari seorang sultan diganti ketika sultan tersebut wafat atau tidak mempunyai maslahatnya terhadap rakyat.

Dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyah* sebuah wilayah harus dipimpin oleh seorang seorang pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا أَحَدَهُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ)³³

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar radiyallāhu ‘anhumā: bahwa sungguh Nabi saw bersabda: tidak dibolehkan bagi tiga orang yang berada di muka bumi ini, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin di antara mereka”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa di dalam sebuah kelompok atau wilayah yang terdapat di dalamnya manusia tiga orang atau lebih harus mengangkat seorang pemimpin yang akan bertugas untuk memimpin yang lainnya.

Kesultanan Tidore memiliki seorang pemimpin yaitu sultan, maka ini tidak bertentangan dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, bahkan ini merupakan sebuah kewajiban bagi suatu wilayah.

Sultan Tidore dibantu dengan 4 kementerian yang dalam bahasa Tidore yaitu *Bobato Pehak Raha* (Bobato empat pihak). Dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyah* menjelaskan mengenai dengan Kementerian, kementerian dalam bahasa Arab yaitu wazir dengan bentuk jamaknya adalah Wazarā.

al-Siyāsah al-Syar'iyah membagi menteri menjadi dua macam:

1. Menteri *Tafwidhi* (dengan mandat penuh).

³⁰Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, Wawancara, 27 April 2019.

³¹A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari'ah*, h. 173.

³²A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari'ah*, h. 174.

³³Al-Imām Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *al-Musnad*, h. 134.



Menteri *Tafwidhi* (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat oleh *imam* (Khaifah) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri.

2. Menteri *Tanfidzi* (pelaksana).

Menteri *Tanfidzi* (pelaksana) ialah menteri yang diangkat oleh *Imam* (khalifah) untuk membantu *Imam* (khalifah) tidak sesuai dengan pendapatnya akan tetapi mengikuti perintah dari seorang pemimpin.³⁴

Dari pembagian di atas maka dilihat dari struktur yang ada di pemerintahan Kesultanan Tidore tidak ada pembagian seperti di atas, karena semua keputusan kementerian yang ada di Kesultanan Tidore harus diajukan ke Sultan dan melakukan permusyawaratan.

2. Sistem pergantian Kepala Pemerintahan

Dalam sistem pergantian Kesultanan Tidore tidak mengenal Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Proses seleksi seseorang untuk menjadi sultan dilakukan ketika seorang sultan meninggal dunia, lalu calon sultan dipilih melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari pihak *Dano-Dano Folaraha* (Wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, *Fola Rum*, dan *Fola Bagus*. Dari nama-nama tersebut kemudian dibawa ke dewan pemilihan sultan yaitu *kornono gamtufkange* dan *kornono gurabunga*, kemudian dipilihlah satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore.³⁵

Seseorang yang hendak menjadi Sultan Tidore hendak memiliki beberapa kriteria diantaranya:

1. Mempunyai niat yang baik.
2. Memiliki fisik yang kuat.
2. Harus dari keturunan sultan.
3. Mempunyai bakat yang mumpuni dalam bidang agama, pemerintahan, dan lain-lain.³⁶

Dalam dikenal dengan *Bai'at* atau pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.³⁷ Pada waktu Ustman bin Affan diangkat menjadi khalifah, yang mula-mula membai'at adalah Abdurrahman bin Auf kemudian diikuti oleh manusia yang ada di masjid.³⁸

Jika diamati, tampak bahwa yang membai'at Ustman itu adalah *ahl halli wa al-aqdi* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya. *Imāmah* itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) *Imām* sebelumnya.³⁹

Syarat-syarat menjadi *Imām*, Imam al-Māwardi menjelaskan tujuh syarat *Imām*:

1. Adil

³⁴Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 5.

³⁵M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. <http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-pemerintahan-kesultanan-tidore.html> (02 januari 2008).

³⁶Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

³⁷T.M Hasbi ash-Siddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, h. 66.

³⁸Ibnu Qutaibah Adainuri, *al-Imāmah wa al-Siyāsah*, h. 16.

³⁹Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 6.



2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk berijtihad dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
3. Sehat panca indranya.
4. Sehat anggota badannya.
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan tanggung jawab dan tabah dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
7. Nasab, *Imām* harus orang Quraisyi.⁴⁰

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem Kesultanan Tidore sejalan dengan siyasah syar'iyah, sebab tidak bertentangan dengan struktur pemerintahan islami begitupula dengan system pemerintahan islami.

KESIMPULAN

- a. Pada Salah satu kerajaan yang ada di Maluku Utara yang masih memakai dengan sistem pemerintahan kerajaan Islam adalah kesultanan Tidore, terdapat banyak sistem pemerintahan kesultanan Tidore di antaranya adalah bahwa kesultanan Tidore tidak mengenal dengan Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainya yang ada di Nusantara. Pemilihan Sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon yang di ajukan oleh *Dano-Dano Folaraha* (wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Rum, Fola Yade, Fola Ake Sahu, Dan Fola Bagus* dan dari nama-nama inilah maka dipilih salah satunya untuk menjadi Sultan Tidore.
- b. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam adalah agama yang sangat teladan dalam dunia politik Islam, maka *al-Siyāsah al-Syar'iyah* mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya sikap politik sesuai dengan al-Quran dan sunah Rasulullah saw. *al-Siyāsah al-Syar'iyah* ini telah dilakukan Rasulullah saw dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridai oleh Allah swt, kemudian dilanjutkan kepada para sahabat dan sampai pada zaman sekarang ini. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* memandang bahwa sistem yang berlaku dalam Kesultanan Tidore masih memakai Sistem pemerintahan Islam seperti asas yang dipakai dalam Kesultanan Tersebut yaitu Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, *Paramitha "Moluccan Responses to the First Intrusions of the West," Dynamic of History, (eds) Haryati Subadio, et. a l.* Amsterdam: North Holland Pub. Co. 1987.
- Abimanyu, Soedjipto. *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara Cet: I;* Jogjakarta: Laksana, 2014 M.
- Adainuri, Ibnu Qutaibah. *al-Imāmah wa al-Siyāsah* t. Cet; Mesir: Muasasah al-Halabi, 1967.

⁴⁰Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 6.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Azdī, Al-Imām al-Hafīz Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī. *Sunan Abī Dāwud* Cet. I; Riyād: Dār bin hazam, 1997.
- Al-Bukhārī, Muhammad Bin ismā'īl bin Ibrāhīm. *ṣaḥīḥ al-bukhārī* cet. V; lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2007.
- Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā' Ismā'īl bin Umar bin Katsīr al-qurasyī. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* Cet :I, Arab Saudi: Dār al- Ṣiddīq, 1425 H/2004 M.
- Al-Hambal, Al-Imām Ahmad bin Muhammad. *al-Musnad* Cet. 4; Mesir: Dār al- Ma'ārif, 1972.
- Ali, Ameer. *The Spirit of Islam*, Terjemahan H.B. Yasin Cet. II; Jakarta: PT. Pembangunan, 1967 M.
- Al-Ifrīqī, Muhammad bin Mukhrim bin Manzūr. *Lisān al-Arab* Beirut: Dār Ṣādir, t.th
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn* Cet: I; Beirut: Dār al-Jayl, t.th.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. *al-Siyāsah wa al-Syar'iyyah* Cet. I; Kairo: Dār Anshar, 1977.
- Al-Māwardī, Abu Hasan. *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, Cet. 3; Mesir: musthafā al-Asābil Halabi, t. th.
- Al-Naisābūrī, Al-Imām Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *ṣaḥīḥ muslim* Cet. I; arab Saudi: Dār Ihyā al-Turās, 1955.
- Al-Qur'an al-Karim*
- Al-Qurtubī, Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-muqtaṣid* Cet. 1; Kairo: Dār al-Jauzī, 2014.
- Al-Syāfi'i, Abd al-'Azīz bin abd al-Salām al-Salmī al-Dimasyqī al- Syāfi'i. *Tafsīr al-Qur'ān* Cet :I, Arab Saudi: Dār al- Ṣiddīq, 1416 H/1996 M.
- Ash-Siddiqy, T.M Hasbi. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Cet. I; Jakarta: Matahari Masa, 1969 M.
- Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, *Kota Tidore Kepulauan Dalam Angka*, Tidore: BPS Kota Tidore Kepulauan, 2021.
- Darmawijaya. *Kesultanan Islam Nusantara* Cet: I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Cet. I; Bandung: Prenada Media, 2003.
- Gustama, Faisal Ardi. *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara* Cet. 1; yogyakarta: Brilliant books, 2017.
- [Http://msyamsul.blogspot.com](http://msyamsul.blogspot.com), *Struktur -Pemerintahan-Kesultanan-Tidore*. 02/01/2008.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul al-Islam. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'i wa ar-Rā'iyyah* Cet. I, Arab saudi: Dār al-Wathan, 1427 H.
- Kamus Besar Bahas Indonesia Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Maududy, Abu al-'Ala. *al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam* Cet. II; Jakarta: Sinar Hudaya, 1972 M.
- Munjid Fil Lughoh Wa Al A'lam. Dar El Machreq Sarl Publishers, P.O.B. Beirut-Lebanon, 1986.
- Pulungan, J. Suyuthi. *fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Putuhena, M.Saleh. *Interaksi Islam Dan Budaya Maluku* t. Cet; Bandung: Mizan, 2006.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 3 No. 1 (2022): Hal. 81-99

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya* Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah* Cet. III; Bandung: Surya Dinasti, 2016.

Winarno, M.E. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani* Cet. 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.

Zaidan, Abd al-Karim Zaidan. *al-Farḍu wa al-Dawlah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah* Cet. II; Beirut: al-Ijtihad al-Islam al-'Ālami, 1970 M.